

ISU EKONOMI POLITIK LINGKUNGAN GLOBAL DALAM PERUBAHAN KEBIJAKAN INDUSTRI TEKSTIL DI INDIA

POLITICAL ECONOMY OF THE GLOBAL ENVIRONMENT IN THE CHANGING POLICY OF THE TEXTILE INDUSTRY IN INDIA

Shuluh Shasa Nadita

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
shuluhshasa@gmail.com

Abstract

India plays a crucial actor in the world manufacturing hub of textile. Although the industry contributes to 2nd largest national income and employs to more than 45 million people, unregulated environmental and wage-labor laws lead to massive wastewater, unethical trading and environmental degradation throughout the country. European Union is the biggest market for India's textile and clothing export. As the single market began to pronounce ethical credentials in its platform to build relation, India's lack of transparency towards environment and ethical trade are being addressed upon reaching the new trade deal (FTA) since 2007 which went stagnant years after. In order to re-obtain the textile export access to European market, Indian decision makers are to rethink an elaborated new strategy for a broader and sustainable market. This research aims to reveal that India shift to environmental-friendly textile policy is primarily profit driven by accommodating European standards of environmental and social clauses.

Key words : *India, European Union, Environment, Policy, Market*

I. Pendahuluan

Perkembangan industri *fashion* dan tekstil meningkat drastis di abad ke 21. Pada rentang waktu tahun 2000 hingga 2014, produksi pakaian meningkat di mana konsumen membeli 60% lebih banyak pakaian dibandingkan 15 tahun sebelumnya. Industri fashion global setidaknya menghasilkan \$2.5 triliun setiap tahun dan mempekerjakan lebih dari 75 juta orang di mana 75% nya adalah wanita (Nagaraj, 2019). India merupakan salah satu negara yang berkontribusi besar dalam industri pakaian dan tekstil. Tahun 2017-18, tercatat sekitar 45 juta orang di India bekerja untuk industri tekstil. Menjadi

produsen terbesar dan eksportir kedua terbesar, kebutuhan kapas sebagai bahan dasar utama tekstil di India mencapai 70% dalam konsumsi sehingga menjadikan kapas sebagai *white gold* yang telah dibudidayakan sejak 5,000 tahun yang lalu (India Law Offices, 2008). Sementara itu, sektor industri tekstil menyumbang sekitar 20% dari total industri India, 7.5% PDB dan mendatangkan pendapatan asing sekitar 32% (Jaybhaye, 2018).

Selama masa kolonial, pabrik-pabrik tekstil di India sudah berorientasi ekspor dan sangat kompetitif (Supriya & Vidya, 2012). Namun, baru pada akhir tahun 1980-an India memulai kebijakan liberalisasi pasar, menggiatkan ekspor kain, membuka aliran impor teknologi

dan mesin di bawah *the 1985 National Policy on Textiles*. Menjadi eksportir tekstil kedua terbesar setelah China, pendapatan dari industri tekstil India hingga bulan Juli 2019 mencapai angka \$250 miliar (Make in India, 2019). Uni Eropa merupakan pasar utama bagi ekspor tekstil India yang menerima 22% ekspor tekstil dan 43% pakaian jadi (India Law Offices, 2008). Sejak awal perjanjian dagang yang baru di tahun 1994, perdagangan tekstil India dengan Uni Eropa mengalami perkembangan dan pasang surut. Melihat pesatnya *global fast fashion*, pemerintah India menargetkan ekspor tekstil sebanyak \$31 miliar dan menarik investasi asing sebanyak \$11.93 miliar dalam periode 2018-2020 (Make in India, 2019).

Pada 2 Oktober 2016, pemerintah India mulai meratifikasi Perjanjian Paris dengan menargetkan penggunaan bahan bakar non-fossil hingga 40% di tahun 2030 (Climate Action Tracker, 2019). Pemerintah berkomitmen untuk mengubah sistem ekonominya agar lebih berkelanjutan berdasarkan UNSDGs dan Paris Accord sebagaimana pernyataan duta besar dan perwakilan India di PBB dan sejumlah organisasi internasional di Jenewa, Ajit Kumar (Sonowal, 2018). Untuk itu, pemerintah India mulai melakukan usaha-usaha untuk mentransformasi industri yang ramah lingkungan termasuk industri tekstilnya. Dalam sektor tekstil, perubahan kebijakan akan fokus pada target pemenuhan SDG 5: kesetaraan gender, SDG 6: air bersih dan SDG 7: energi terbarukan (Textile Exchange, 2018). Pemerintah akan menargetkan *2030 Agenda for Sustainable Development* menuju *New Big Textile Revolution*. Dengan mengedepankan industri yang menekankan kebijakan *reuse, repair, recycle*, industri India dapat mengurangi beban polusi, meningkatkan kualitas kesehatan dan ekonomi warga (UNIDO,

2019). Sektor tekstil di India akan difokuskan pada penggunaan energi efisiensi dalam *the National Solar Mission*, pengolahan limbah *zero liquid discharge* dan berbagai kebijakan dalam kerangka *zero defect zero effect*.

Namun, industri yang ramah lingkungan seharusnya menjadi hal yang dihindari India. Industri ramah lingkungan bertentangan dengan usaha penuntasan kemiskinan, percepatan pembangunan dan industrialisasi di India yang saat ini gencar dilakukan (Jones & Saran, 2015). Selain itu, industri ramah lingkungan merupakan strategi yang *high cost* serta dapat menghambat India untuk mencapai target *\$10 trillion economy* di tahun 2030 yang sudah digagas sejak awal pemerintahan Narendra Modi (Saha & Misra, 2019). Industri ramah lingkungan tidak mudah dijalankan secara menyeluruh oleh negara berkembang. Dalam target menuju percepatan industrialisasi, konsumsi batubara semakin intens bahkan setelah India meratifikasi Perjanjian Paris. Penelitian mengungkapkan bahwa meskipun India mulai beralih ke energi matahari, batubara masih menjadi proyek penting pembangunan (Ebinger, 2016).

Sektor tekstil di India sendiri merupakan salah satu industri yang mengonsumsi energi paling dengan teknologi kuno terutama pada sektor yang terdesentralisasi. Produksi tekstil rumahan memakan energi 70-80% dari total produksi tekstil secara keseluruhan (Bhaskar, Verma, & Kumar, 2012). Sektor tekstil juga merupakan konsumen bahan kimia paling intens dalam negeri. Satish W. Wagh, mantan pimpinan perusahaan kimia *Chemexil*, mengatakan bahwa adanya batasan penggunaan bahan kimia dalam industri guna meminimalisir pencemaran merupakan hal yang dapat menghambat proses

pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang seperti India (Khan, 2019).

Ketergantungan akan batubara tersebut membuktikan bahwa India masih *pro* terhadap industri konvensional dengan energi efisien dan proses yang cepat. Oleh karena itu, perubahan ke lingkup industri yang lebih ramah lingkungan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Paris memunculkan kekhawatiran atas komitmen India tersebut. Proyek infrastruktur yang ambisius dan ekspansi sektor produksi di India diperkirakan akan semakin meningkatkan pengeluaran emisi CO₂ hingga 14% di tahun 2040 (Khadka, 2019). Dengan target waktu yang sama, ratifikasi Perjanjian Paris dengan target posisi sebagai tiga besar negara industri di dunia memunculkan dilemma dikotomi konsumsi-produksi di India yang memunculkan pertanyaan terkait alasan India mengadopsi kebijakan tekstil yang ramah lingkungan.

II. Kerangka Pemikiran

1. Ekonomi Politik Lingkungan Global

Konsep ekonomi politik lingkungan tidak lepas dari kajian ekonomi politik global yang mengintegrasikan isu lingkungan dengan pasar (Balaam & Dillman, 2014). Meskipun demikian, Thomas dan Hines mengatakan bahwa perusahaan bermain sebagai aktor ekonomi yang berorientasi profit yang tidak memiliki tanggung jawab akan masyarakat maupun lingkungan yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, Adam dan Kütting juga berpendapat bahwa *“ecological and technological processes do not share the same underlying principles according to which they evolve of function. Ecological processes are highly interactive, rhythmic, cyclical and ‘renewable’.*

Technological processes, on the other hand, are extremely linear, non-renewable” (Adam & Kütting, 1995).

Terlepas dari pernyataan di atas, sistem produksi global bekerja atas permintaan pasar. Perusahaan akan memakai dalih ‘pengutamakan lingkungan dan praktik etis’ untuk mengimbangi standar konsumen masa kini dalam memperoleh keuntungan lebih sebagaimana pernyataan Clapp dan Dauvergne; *“business, here, is seen as an environmental leader, as the pursuit of profits becomes the pursuit of more efficient use of the environment”* (Clapp & Dauvergne, 2005). Pernyataan ini diperkuat dengan penelitian yang menunjukkan bahwa terminologi *green* mulai menarik minat konsumen. Sebagian besar konsumen berpendapat bahwa ramah lingkungan, perdagangan yang adil hingga perlindungan hewan merupakan preferensi dan tanggung jawab bersama. Mazar dan Zhing menambahkan bahwa sebagian besar konsumen merasa puas setelah membeli produk yang mempertimbangkan etika dan lingkungan (Ethical Consumer, 2019). Dengan demikian, terdapat korelasi antara preferensi moral dengan permintaan pasar yang harusnya menjadi pertimbangan perusahaan dalam memenuhi standarisasi konsumen.

Komisi Uni Eropa pada tahun 2018 menyatakan bahwa kawasan tersebut mulai kritis dengan sumber yang berkelanjutan; yang minim kerusakan lingkungan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, regulasi yang jelas dan memadai hingga kondisi kerja yang layak (International Trade Centre & European Commission, 2019). Kementerian Luar Negeri Uni Eropa bahkan memiliki platform *the centre for the promotion of imports* (CBI) yang memberi panduan standar ekspor ke Uni Eropa dan berbagai regulasi lain baik kebijakan lokal maupun internasional

terkait lingkungan dan aturan non-tarif lain (CBI Minister of Foreign Affairs, 2019). Pemberlakuan kebijakan tersebut didasarkan pada penelitian tahun 2017 yang menyebutkan setidaknya 4 dari 5 konsumen di Eropa lebih memilih produk ramah lingkungan yang disertifikasi langsung oleh organisasi-organisasi independen (Felbermayr, Mitra, Aichele, & Gröschl, 2016).

Sebelumnya di tahun 1997, 70 pewarna yang mengandung azo sudah dilarang oleh kementerian lingkungan dan perhutanan yang diumumkan melalui *Indian Import Policy*. Kementerian perdagangan bahkan mengharuskan eksportir tekstil untuk memiliki tes uji laborat di fasilitas yang memiliki sertifikasi ISO 17025 dari agen akreditasi nasional (fibre2fashion, 2014). Kebijakan mengenai pelarangan ini tidak lain merupakan respon dari larangan yang sama oleh Jerman di tahun 1994 dan Belanda di tahun 1996 yang akhirnya memimpin Uni Eropa memberlakukan standar umum bagi semua negara anggota (Textile Committee, 2014). Aturan yang diprakarsai Jerman dalam pelarangan penggunaan pewarna azo ini sempat menurunkan ekspor tekstil India yang 70% produk tekstilnya mengandung pewarna azo (Begum & Kumar, 2018).

Sejak adanya klausul lingkungan dan sosial yang dibawa Uni Eropa dalam membangun kerja sama, pemerintah India dinilai mulai mengadopsi kebijakan-kebijakan yang ramah lingkungan terutama sejak negosiasi kerja sama perdagangan (FTA) dengan Uni Eropa tahun 2007. Kebijakan seperti *National Action Plan on Climate Change* tahun 2008 dan *Singh Covergence Principle* oleh para pengamat seperti Thaker dan Leiserowitz dilihat sebagai salah satu bentuk respon dari standar-standar kerja sama Uni Eropa (Thaker & Leiserowitz, 2014). Pasca Uni Eropa

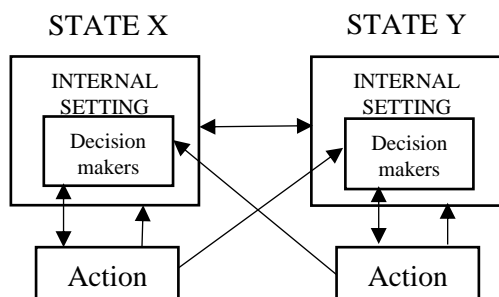
mengeluarkan berbagai larangan bahan kimia dalam produk yang memiliki dampak terhadap kesehatan dan lingkungan melalui REACH, India kembali mempertimbangkan 7 jenis bahan kimia yang sering digunakan dalam tekstil seperti *formaldehyde*, cadmium, pentachlorophenol, hexavalent chromium, pestisida beracun, zat yang mengandung logam berat, zat yang mengandung halogen dan sebagainya (Textile Committee, 2014).

Oleh karena adanya standar-standar mengenai lingkungan maupun praktik etis di Uni Eropa, India sebagai salah satu pemasok tekstil ke kawasan tersebut kemudian mengadopsi kebijakan-kebijakan ramah lingkungan dengan logika bahwa apabila India tidak merespon standar-standar tersebut maka India akan kehilangan akses pasar terbesarnya sebagaimana pernyataan Clapp dan Dauvergne bahwa bisnis (India) sebagai pemimpin lingkungan karena pengejaran terhadap profit secara tidak langsung akan menginklusi klausul-klausul tentang lingkungan. Namun merujuk pada pernyataan Adam dan Kütting bahwa akumulasi profit dan konsep ramah lingkungan tidak bisa disatukan, India tidak lantas meninggalkan industri tekstil dengan sistem ekonomi linear (konvensional) dengan kontinuitas mengandalkan batubara sebagai sumber energi pokok yang efisien (Bhutoria, 2018).

2. Kebijakan Pembuatan Keputusan

Kebijakan pembuatan keputusan diperoleh melalui analisis multilevel, dari mikro-makro dan internal-eksternal (Afinotan, 2014). Snyder, Bruck dan Sapin berpendapat bahwa adanya aksi, reaksi dan interaksi turut mendefinisikan kebijakan suatu negara dalam proses

pengambilan keputusan (Snyder, Bruck, & Sapin, 1969). Para aktor pembuat kebijakan bertindak atas refleksi kondisi sosial ekonomi, politis dan ideologis dalam negeri. Selain itu, preferensi aktor individu, partai politik, organisasi, kelompok etnis hingga korporasi menjadi bagian dari pembuatan kebijakan suatu negara (Afinotan, 2014). Pada level internal, para kelompok kepentingan mendesak pemerintah untuk dapat mengakomodasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara dalam level eksternal, pemerintah nasional akan memaksimalkan usaha mereka untuk dapat memenuhi tekanan domestik (Putnam, 1988). Para pembuat kebijakan di negara X dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan di negara Y melalui *action* atau sebaliknya. *Action* dari masing-masing negara dibuat oleh para pembuat kebijakan di mana *action* ini akan kembali masuk ke dalam proses pembuatan kebijakan (Snyder, Bruck, & Sapin, 1969).



Sumber diolah oleh Snyder, Bruck, dan Sapin, 1969

Politik domestik dan hubungan internasional turut berkontribusi dalam tercapainya kebijakan suatu negara yang seringkali mengalami tumpang tindih apakah keadaan dalam negeri dapat mempengaruhi hubungannya dengan negara lain atau sebaliknya. Robert D. Putnam berargumen bahwa politik dalam negeri menjadi lebih kuat karena

adanya tekanan internasional di mana “*international pressure was a necessary for policy shifts*”. Dalam skripsi ini, faktor ekonomi akan menjadi pembahasan dominan sebagaimana ditekankan oleh Katzenstein, Alt, Evans dan Gourevitch bahwa pengaruh ekonomi internasional dalam politik domestik dan kebijakan ekonomi domestik merupakan kajian yang menarik. Katzenstein mengatakan bahwa, “*the main purpose of all strategies of foreign economic policy is to make domestic policies compatible with the international political economy*” (Putnam, 1988).

Globalisasi memicu adanya internasionalisasi ekonomi dan budaya. Ketika suatu negara mulai terbuka secara ekonomi, maka menjadi mungkin bagi masyarakat beserta regulasi dalam negeri untuk melebur ke dalam kebudayaan dan sistem global. Pada akhirnya, garis antara politik domestik dan internasional menjadi *blur*. Berbagai isu mulai melintasi batas-batas negara yang menggabungkan isu domestik dan internasional menjadi satu dengan istilah *intermestic* (*international-domestic*). *Intermestic* ini menjadi istilah bahwa perilaku aktor dan kekuatan transnasional saling mempengaruhi satu sama lain baik dalam isu maupun kepentingan (Hudson, 2014).

India merupakan negara yang memiliki target ekonomi mencapai \$5 trillion di tahun 2024 dan \$10 trillion pada tahun 2030 (Saha & Misra, 2019). Namun, pada bulan April-Juni terjadi penurunan perlambatan sebanyak 6% dibandingkan tahun sebelumnya di angka 7.4%. Sektor tekstil yang menyumbangkan pendapatan nasional kedua terbesar di India berada di titik rendah dalam beberapa tahun terakhir. Ekspor tekstil secara keseluruhan turun dari 51% di tahun pertama tahun 2017 menjadi 45% di awal 2019 (Parashar,

2019). Salah satu faktor yakni hambatan tariff yang terjadi di antara India dengan partner ekonomi di wilayah lain khususnya Uni Eropa yang menerima aliran produk lebih banyak dari Bangladesh dan Vietnam berkat *duty-free access*. Ekspor pabrik India ke Uni Eropa turun 7% hingga Quartal pertama tahun 2019 sementara ekspor kapas turun dari \$4.5 miliar tahun 2013-14 menjadi \$3.4 miliar tahun 2017-18. Turunnya kapasitas ekspor kapas dan pabrik ini mempengaruhi keseluruhan rantai produksi tekstil termasuk hilangnya lapangan kerja mulai dari agrikultur (kapas) hingga barang jadi (Suneja, 2019).

Di sisi lain, Uni Eropa mengatakan bahwa produk-produk tekstil India belum memenuhi standar impor di kawasan tersebut. Uni Eropa mulai melabeli dirinya sebagai pusat *sustainable apparel* di dunia seraya pengecer-pengecer tekstil di kawasan tersebut mulai melakukan revolusi *green*. Untuk itu, Uni Eropa melalui platform *the centre for the promotion of imports* (CBI) memberlakukan standar ke ekspor ke kawasan terkait lingkungan dan aturan non tarif lain (CBI Minister of Foreign Affairs, 2019). Dengan adanya aturan-aturan dari Uni Eropa yang mengharuskan adanya *labelling* dan transparansi mengenai lingkungan dan praktik etis terutama pasca negosiasi FTA pertama, India mulai secara bertahap mengadopsi kebijakan tekstil yang lebih ramah lingkungan hingga sampai pada ratifikasi Perjanjian Paris pada Oktober 2016 dengan *tagline New Big Textile Revolution* (UNIDO, 2019). Sebagaimana pernyataan di atas bahwasannya tekanan internasional, dalam konteks ini Uni Eropa, menjadi penyebab adanya *policy shift* di India terutama dalam industri tekstil atas adanya permintaan pasar baru yang

menginginkan nilai-nilai etis dan perlindungan lingkungan di dalamnya.

Meskipun demikian, India tidak lantas meninggalkan industri tekstil konvensional yang telah lama menopang pendapatan negara terkait produksi yang cepat dan murah. Kebijakan India ini lebih tepat dikaitkan dengan analisis area pasar (*market area analysis*) oleh Chaudhuri bahwasannya produksi barang (dalam hal ini tekstil) mengikuti spesialisasi berdasarkan permintaan dari pembeli di kawasan tertentu (Chaudhuri, 1978). Adanya keputusan untuk mentransformasi sejumlah kebijakan tekstil yang ramah lingkungan dinilai sebagai strategi untuk mengakomodasi pasar baru di Uni Eropa.

C. Pembahasan

A. Industri Tekstil India: Dampak Sosial dan Lingkungan

Industri tekstil merupakan sektor tertua di India sejak 3.000 tahun lalu. Ketika India memasuki fase pasar liberal, industri tekstil mampu mengalami pertumbuhan yang cukup masif setelah mengalami stagnasi dalam jangka waktu yang lama. Periode tahun 1990-an merupakan awal pertumbuhan ekonomi India yang mencapai angka 6% (Oberoi, 2013). Industri tekstil India sendiri menyumbang 7.5% PDB, 20% total produksi industri, 27% dari pemasukan devisa dan 32% dari pendapatan ekspor negara (Jaybhaye, 2018). Menjadi produsen kapas dan rami terbesar di dunia, industri tekstil mempekerjakan kurang lebih 45 juta orang di India (Centre for Environment Education & Industrial Pollution Prevention Group, 2016). Selama April 2000-Juni 2019, total investasi asing langsung (FDI) untuk tekstil India mencapai \$3.2 miliar. Ekspor tekstil

India juga diprediksi akan mencapai \$300 miliar di tahun 2024 (Mann, 2019).

Meskipun berkontribusi besar bagi perekonomian negara dan peluang kesempatan kerja khususnya bagi kaum wanita, mega industri tekstil di India tidak lepas dari berbagai masalah sosial dan lingkungan. Aliran investasi asing langsung (FDI) yang masuk sebagai akses India ke dalam pasar internasional justru menjadi jurang degradasi sosial dan lingkungan (Supriya & Vidya, 2012). Struktur industri tekstil India yang terbagi atas sektor yang terorganisir dan yang terdesentralisasi justru menimbulkan masalah lain. Kebijakan ini memang ditujukan guna menciptakan industri-industri kecil padat karya. Namun, India menghadapi konsekuensi isu polusi. Hal ini disebabkan karena kebijakan industri yang terdesentralisasi tidak memperhatikan masalah teknologi konvensional, tenaga kerja yang tidak terorganisir, bahan kimia yang berbahaya, penggunaan mesin diesel untuk penenunan, kapas *genetically-modified* (GM), metode kerja yang salah sehingga menimbulkan banyak masalah lingkungan dan sosial yang tragis (Zsakay, 2018).

1. Eksploitasi Buruh Tekstil

India memiliki catatan yang buruk dalam manufaktur pakaian dan pengumpulan sampah akibat pemberian upah yang minim terhadap pekerja sehingga menciptakan masyarakat sosial yang rendah. Pekerja di industri tekstil sebagian besar adalah wanita yang telah diorganisasikan sejak tahun 1970-an. Selama masa kolonial, pabrik-pabrik tekstil di India sudah berorientasi ekspor dan sangat kompetitif. Namun, karena hanya terdapat sedikit investasi dan modal, perusahaan mengerahkan tenaga kerja dengan tanpa regulasi dan sedikit perlindungan. Hal ini juga diungkapkan

Lembaga Pencegahan Polusi Industri bahwa hukum tenaga kerja di India masih sangat rendah. Tidak seperti industri lain di dunia yang mengikuti standarisasi neo liberalism, sistem dan aturan pekerja dalam industri pakaian di India tetap memakai gaya kolonialisme yang eksploitatif seperti ruang kerja yang tidak memadai, standar jam kerja yang buruk hingga pelecehan seksual (Supriya & Vidya, 2012).

Akhir tahun 1990-an, Bank Dunia merevisi fokus eksklusif bagi para pekerja yang bekerja sama dengan organisasi buruh internasional (ILO) dalam rangka mempromosikan wirausaha swasta untuk dijadikan pilihan bagi para pekerja yang mengalami tekanan. Namun, kebijakan ini nyatanya menemui jalan buntu akibat lemahnya hubungan pekerja dengan pemerintah, pemilik modal dan kaum proletariat (Agarwala, 2016). Lembaga non-profit Remake mencatat 75 juta orang di seluruh dunia bekerja dalam lingkaran produksi pakaian di mana 80% pekerjanya adalah wanita berusia 18-25 tahun. Sejak masuknya India ke dalam gelombang neo liberalism, pemberlakuan Program Penyesuaian Struktural (*Structural Adjustment Program/SAP*) kemudian dituduh memperburuk regulasi ketenagakerjaan dan lingkungan sosial di India (Sustainable Brands, 2018). Sebanyak 99.2% buruh tekstil tunduk pada sistem kerja paksa berdasarkan hukum India karena mereka tidak menerima upah minimum yang ditetapkan negara. Buruh tekstil umumnya hanya menerima sepersepuluh dari upah minimum yang bahkan sering mengalami keterlambatan pemberian (Ratcliffe, 2019).

Buruh tekstil terutama di bagian barat daya Bangalore, kota dengan orientasi ekspor tekstil, rata-rata bekerja selama 46 jam seminggu dalam dengan upah sekitar \$2.27 per hari yang apabila

diakumulasikan dalam sebulan tidak sampai pada standar upah minimum di negara tersebut (Sustainable Brands, 2018). Penelitian dari University of California yang didukung Humanity United juga menemukan pekerja wanita dan anak-anak pada sejumlah sektor tekstil di India hanya diberi upah sebesar 15 sen (11p). Setidaknya terdapat satu dari lima buruh tekstil di India berusia di bawah 17 tahun dari hasil wawancara terhadap 1.432 buruh bekerja di sektor tekstil dengan usia 10 tahun menjadi yang termuda. Di utara India, 2/3 pekerja anak bahkan tidak bersekolah untuk mencukupi kebutuhan hidup (Ratcliffe, 2019). Sebelumnya, Laporan dari Departmen Tenaga Kerja AS tahun 2018 mengungkap banyaknya tenaga kerja anak dalam industri pakaian di Argentina, India, Pakistan, Indonesia, China, Bangladesh, dan sebagainya (Drew & Reichart, 2019).

]Dalam sektor pertanian kapas, pemberlakuan SAP yang semakin mensubordinasikan kaum petani menyebabkan banyak anak terlahir cacat akibat masifnya penggunaan pestisida pada tanaman kapas lokal supaya mengalami pertumbuhan masif dan cepat guna bersaing dengan *bt-cotton*. Selain itu, laporan pemerintah menyebutkan bahwa sebanyak lebih dari dua juta petani gurem dan marjinal kehilangan tanah setiap tahun di mana dari 27.9 juta pada 1951 menjadi 50 juta sejak sejak tuntutan SAP mulai diberlakukan sehingga memaksa petani beralih menjadi buruh dengan upah harian yang rendah. Sejak tahun 1951, pertanian setidaknya memberi kesempatan kerja bagi 72% populasi dan 59% bagi PDB. Namun, di tahun 2001, sektor pertanian hanya mampu mempekerjakan 54% dari populasi saja sementara PDB turun drastis ke angka 24%. Jumlah warga yang kehilangan tanah juga meningkat dari 35% di tahun

1987 menjadi 55% di tahun 2005 (Supriya & Vidya, 2012).

Hilangnya kendali atas lahan dan hak paten juga membuat banyak warga yang bergantung pada sektor pertanian kelaparan dan akhirnya menuntun pada bunuh diri masal di tahun 1999. Tercatat, 500 petani kapas bunuh diri di Maharashtra, Punjab, Karnakata, Andhra Pradesh, Haryana setelah meminum pestisida akibat tingginya harga pestisida, biji kapas hibrida/Bt-Cotton, hingga harga penjualan yang rendah dan lahan yang menyusut (The International Forum on Globalization, 2003). Ketika ekspor pakaian menyumbang PDB hingga 4% serta 20% dari output industri pada tahun 2001, buruh pabrik dalam lingkaran industri tersebut masih dicap sebagai pekerja serabutan dengan upah minim. Kerentanan pada sektor pertanian kapas yang berlanjut kembali menuntun petani ke dalam hutang dan gelombang bunuh diri masal petani kapas yang terjadi lagi di tahun 2011-12 (Shiva, 2013).

2. Degradasi Lingkungan

Pertumbuhan meteorik di India juga memunculkan kekhawatiran industri pakaian yang menimbulkan polusi mulai dari sampah pabrik hingga emisi karbon (Segran, 2019). Tanaman kapas yang menjadi andalan tekstil India, merupakan tanaman yang memerlukan banyak air dan tenaga listrik dengan rentan terhadap perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan terkait tekanan krisis air. Kapas merupakan tanaman yang mengonsumsi 24% insektisida dan 11% pestisida meskipun hanya menggunakan 3% dari seluruh tanah subur di dunia (Jaybhaye, 2018). *Intergovernmental Panel on Climate Change* pada tahun 2009 menyatakan bahwa pertumbuhan industri tekstil India menyebabkan peningkatan emisi gas

CO₂ (Hiremath, Kattumuri, Kumar, Khatri, & Patil, 2012). Sebanyak 60% tekstil India berbahan dasar kapas yang budidayanya mengonsumsi 25% pestisida global, menghasilkan limbah lumpur dan zat kimia yang mencemari air (Bauer & Jagasia, 2019).

India memiliki area pertanian kapas terluas di dunia dengan 9 juta ha, mewakili sekitar 20-25% dari total area global yang tekonstentrasi di 9 negara bagian yakni Haryana, Punjab, Maharashtra, Gujarat, Pradesh, Tamil Nadu, dan sebagainya (Jaybhaye, 2018). Apabila dikalkulasikan, pemakaian pestisida di India jumlahnya mencapai 50% (Morlet, Opsomer, Herrmann, Balmond, Gillet, & Fuchs, 2017). Hal tersebut kemudian menempatkan India di urutan ke-94 dalam index kesejahteraan dengan lingkungan berada dalam skor paling rendah (The Legatum Prosperity Index, 2018). *Bt-cotton* yang diciptakan untuk menghemat air dan pestisida bahkan dianggap gagal dan tetap mencemari lingkungan (Dr. Shiva & Jafri, 2004).

Kanpur adalah kota eksportir tekstil di India. Wilayah ini terletak di sepanjang sungai Ganga, sungai yang disucikan 800 juta umat Hindu dan sumber kehidupan. Namun, sungai ini menjadi tempat pembuangan akhir 50 juta liter limbah kain pabrikan yang beracun. Bahan kimia yang terkandung di dalam limbah seperti kromium-6, zat kompleks yang biasa digunakan untuk obat penyakit kulit, mengalir pertanian lokal bahkan sumber air minum warga. Setidaknya di setiap rumah terdapat warga yang terkontaminasi ruam kulit, *pustule*, *jaundice* hingga kanker (Morgan, 2015). Meningkatnya permintaan akan bahan murah juga meningkatkan resiko fatal bertarif mahal pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Selain Kanpur, Solapur yang terletak di negara bagian Maharashtra juga

merupakan kawasan yang terkenal dengan pusat ekspor tekstil. Produksi tekstil masal di Solapur memakan penggunaan energi, air, bahan kimia dalam jumlah masif yang berdampak buruk pada lingkungan. Solapur masuk dalam 17 kota dengan index polusi terburuk tahun 2012 bersama Agra, Bangalore, Delhi, Ahmedabad, Kanpur, Chennai, dan sebagainya (Hiremath, Kattumuri, Kumar, Khatri, & Patil, 2012). Di negara bagian Rajasthan, industri tekstil menyumbangkan limbah berbahaya sementara tempat pengolahan limbah yang memadai belum tersedia (United Nations Climate Change, 2008).

Sebanyak 7 dari 10 kota paling berpolusi terletak di India sementara New Delhi menduduki peringkat ke-7 yang menjadikannya ibukota dengan tingkat polusi tinggi. Analisis senior Greenpeace untuk urusan polusi udara, Lauri Myllyvirta, mengatakan bahwa Asia Selatan sangat bergantung pada bahan bakar padat, biomas dan batubara yang digunakan mulai dari rumah tangga, transportasi hingga industri. Dengan penduduk sebanyak 1.3 miliar di India, peneliti memperingatkan darurat kesehatan publik. Dalam misi Modi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menuntaskan kemiskinan, pemerintah dinilai belum menyelesaikan masalah lingkungan menurut pendiri LSM *care for air in India*, Jyoti Pande Lavakare. Kritik menyalahkan pemerintahan Narendra Modi atas kegagalan mengatasi isu lingkungan dan mengatakan *National Clean Air Program* tidak berjalan (Child, 2019).

B. Uni Eropa dan Hambatan Impor Non-Tarif

India merupakan salah satu pusat manufaktur tekstil terbesar dan eksportir tekstil kedua terbesar di dunia. Uni Eropa (UE) merupakan tujuan primer dari ekspor India yang menerima hampir

60% produk tekstil negara tersebut (Barrie, 2019). Uni Eropa juga merupakan investor terbesar bagi sektor tekstil India setelah Mauritius dengan stok investasi mencapai €51.2 miliar tahun 2015 (EEAS, 2017). Perjanjian bilateral terkait perdagangan tekstil dengan Uni Eropa mulai terjalin secara intens sejak penandatanganan nota kesepahaman dalam *EU-India Cooperation Agreement* pada Desember 1994. Nota kesepahaman ini memungkinkan pemberian kuota impor lebih di bawah *Uruguay Round's Agreement on Textiles and Clothing* (European Commission, 2019).

Sebelumnya, ekspor tekstil India sempat mengalami penurunan sejak *Multi Fiber Agreement* (MFA) tahun 1974 ditetapkan untuk membatasi produk kain berbahan kapas yang pada dasarnya hanya ditujukan untuk melindungi produk domestik negara-negara maju. Setelah MFA berakhir pada Januari 2005, ekspor India memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor tekstil berbahan kapas dengan diperbaruinya *Agreement on Textile and Clothing* (ATC). Pada rentang waktu tahun 2004 – 2009, ekspor benang, kain, dan pakaian jadi ke Uni Eropa mengalami fluktuasi terutama di tahun 2005-6 namun kembali mengalami penurunan tahun 2008-9 yang disebabkan oleh resesi global dan pembaruan kerja sama yang mengalami stagnasi (Manoj, 2014).

Perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang baru dengan spesifikasi kerangka *Broad-based Investments and Trade Agreement* (BTIA) antara India dan Uni Eropa telah dibahas sejak tahun 2007. Namun tahun 2013 setelah melewati 16 kali negosiasi, perjanjian yang baru belum mencapai kesepakatan dan mengalami stagnasi. Duta besar UE untuk India, Tomasz Kozlowski mengatakan bahwa Parlemen Eropa

tidak akan menindaklanjuti FTA apabila sektor *automobile* tidak disepakati (The Hindu Business Line, 2019). Selain itu, pertimbangan pengurangan tariff impor yang disisipi klausul lingkungan, sosial dan hak asasi manusia dirasa tidak akan tercapai. Dari persepektif Uni Eropa, negosiasi perdagangan dan sejumlah kerja sama harus dilandasi pada pembangunan yang berkelanjutan dengan klausul sosial dan lingkungan yang mana India menyatakan keberatan untuk memasukan klausul-klausul tersebut dalam perjanjian perdagangan pada awalnya (Khorana, 2019).

Isu lingkungan dan sosial (perdagangan yang adil, regulasi ketenagakerjaan, dsb) mulai menjadi *highlight* ketika Uni Eropa, AS, dan beberapa negara maju lain memasukannya sebagai hambatan non-tariff tahun 2005-6 dengan pengertian bahwa negara-negara tersebut mempertimbangkan produk dari negara yang memiliki preferensi terhadap lingkungan-sosial (Kumar, Begum, & Das, 2018). Dari adanya berbagai masalah regulasi ketenagakerjaan dan lingkungan, ekspor India ke Uni Eropa mengalami kendala seiring organisasi supranasional tersebut mengangkat isu-isu lingkungan dan sosial ke dalam area kerja samanya dengan entitas lain yang tercantum dalam laporan *the Trade Sustainability Impact Assessment* tahun 2009 pasca pertemuan sejumlah LSM Uni Eropa dan India dalam pembahasan FTA melalui *civil society bilateral meetings* (The European Commission, 2009).

Komisi Eropa bahkan mengatakan bahwa penurunan kuota impor disebabkan oleh lemahnya tekstil India dalam memenuhi standar internasional mengenai lingkungan (European Commission, 2019). Standar internasional tersebut seperti tekstil berbahan kapas tidak boleh mengandung

kromium dan sulfide di atas pH 2 serta phenolics di atas Ph 5 sementara dalam teknik pewarnaan dilarang untuk melebihi Ph 9.3-13 dan berbagai aturan lain (Narayanan, 2018). Importir dari Uni Eropa yang tergabung dalam *Leather and Footwear Industry* umumnya mendesak penyuplai untuk menekan batas penggunaan terhadap bahan kimia berdasarkan *EU's Registration, Evaluation, Authorization, Restriction of Chemicals (REACH)*, persyaratan pengujian dan sertifikasi serta pengemasan dan pengolahan limbah yang sebagian besar aturan ditetapkan oleh masing-masing negara anggota (Khorana & Soo, 2016).

REACH merupakan regulasi Uni Eropa yang digagas di tahun 2006 dan diimplementasikan tahun 2007 sebagai standar penggunaan bahan kimia dalam produk-produk yang mengalir di Eropa yang memiliki potensi dampak pada lingkungan dan kesehatan. Regulasi yang memakan waktu hingga tujuh tahun ini merupakan kebijakan paling penting bagi Uni Eropa dan aturan paling ketat yang mempengaruhi industri di seluruh dunia karena mengatur hingga lebih dari 30.000 zat kimia (Cone, 2006).

Sebanyak 43% aliran tekstil India ke UE berbahan dasar kapas yang boros dalam penggunaan air dan pestisida. Hal ini kemudian menempatkan sektor tekstil India dengan 90%-nya berbahan kapas ke dalam masa kritis. Kurangnya akses perusahaan pada tenaga-tenaga penguji ahli dan laboratorium menjadikan sertifikasi India kurang diterima Uni Eropa. Selain itu, sutra yang menjadi bahan baku terbesar lain juga berkontribusi pada percepatan pemanasan global sementara wol yang menempati urutan ke-6 terbesar dalam sektor produksi India juga menyebabkan akumulasi efek gas rumah kaca (Šajin, 2019). India memiliki *eco label* bernama *eco mark* sejak 1991 yang harus dimiliki

eksportir sebagai identifikasi syarat-prasyarat standar global. Namun Denmark, Jerman, dan Italia mengatakan bahwa label tersebut masih minim informasi dan transparansi, memiliki konsep yang membingungkan, teknisi yang buruk, harga yang mahal dan bahkan tidak mengkonversi adanya konsep keberlanjutan (Kumar, Begum, & Das, 2018).

Pada April 2017, kebijakan ekspor tekstil ke UE semakin diperketat dengan munculnya aturan legal melalui *EU Flagship Initiative* oleh Parlemen dan Komisi Eropa bagi perusahaan-perusahaan UE untuk melacak rantai suplai produksi di negara-negara ketiga terkait isu tenaga kerja dan lingkungan (Šajin, 2019). Sebagai bagian dari *Fashion Revolution*, UE membentuk platform *the centre for the promotion of imports (CBI)* di bawah Kementerian Luar Negeri Uni Eropa yang memberi panduan standar ekspor ke Uni Eropa. Uni Eropa mengharuskan deskripsi produk berisikan transparansi terhadap dampak-dampak lingkungan dan sosial termasuk di dalamnya kualitas, material, label hingga *simple packaging* yang disepakati melalui *Dutch Agreement on Sustainable Garments and Textiles* sejak tahun 2018 dengan target implementasi hingga 80% di tahun 2020 (CBI Minister of Foreign Affairs, 2019).

Dari adanya berbagai standar Uni Eropa terkait lingkungan-sosial, kesepakatan FTA yang baru tidak kunjung tercapai. Tidak adanya kesepakatan baru antara India dan Uni Eropa menjadi celah bagi negara eksportir tekstil lain seperti Bangladesh dan Vietnam untuk meningkatkan produktivitas ekspor mereka ke Uni Eropa. Sebelumnya, Bangladesh dan Vietnam telah menikmati *duty free* dari Uni Eropa di bawah skema *Generalised Scheme of Preferences (GSP)* sejak tahun 2006 yang diklasifikasikan untuk

negara dengan pendapatan nasional di bawah rata-rata global oleh Bank Dunia (Hayashi, 2007). Sementara beberapa negara menikmati akses bebas tariff impor ke Uni Eropa, produk tekstil India dikenai tariff pajak hingga 9.5% (Fibre2Fashion, 2019). Bangladesh memiliki akses ke inisiatif Uni Eropa *Everything but Arms* (EBA) dan *Duty Free Quota Free* (DFQF) melalui *Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association* (BGMEA) (Wazir Advisors, 2016). Melalui sejumlah keterikatan kerja sama dengan Uni Eropa dan perusahaan yang beroperasi di sana, Bangladesh bahkan hampir melampaui peringkat India sebagai eksportir kain terbesar kedua di dunia (Utrikespolitiska Föreningen, 2018).

C. Kebijakan Tekstil yang Ramah Lingkungan

Pasca tahun 2007 setelah India dan Uni Eropa memulai negosiasi pertama perdagangan yang baru (FTA), para pengamat melihat adanya perubahan kebijakan iklim di India sebagai salah satu bentuk respon (Thaker & Leiserowitz, 2014). *The National Action Plan on Climate Change* tahun 2008 kemudian diadopsi untuk mempromosikan tujuan-tujuan pembangunan India yang dibarengi dengan upaya memperoleh keuntungan dari mengatasi perubahan iklim (Dubash, 2013). Meskipun demikian, beberapa kebijakan tersebut masih belum diaplikasikan secara menyeluruh. Misalnya, India menargetkan implementasi energi matahari mencapai 20GW tahun 2022, namun penggunaan batubara masih intens di mana laporan *International Energy Agency* tahun 2013 menyebut emisi CO₂ India akan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 (Thaker & Leiserowitz, 2014). Tahun 2013, FTA India-Uni Eropa mengalami

stagnasi akibat sejumlah kesepakatan yang belum tercapai serta adanya klausul lingkungan dan sosial (Manoj, 2014).

Singh Covergence Principle kemudian diadopsi guna menekankan koordinasi nasional untuk penilaian, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dilihat oleh dua ilmuwan iklim, Thaker dan Leiserowitz, sebagai bentuk pragmatis dalam perubahan kebijakan India dalam merespon perubahan iklim (Thaker & Leiserowitz, 2014). Profesor iklim, energi dan lingkungan dari Centre for Policy Research, Navroz Dubash, memaknai kalimat ‘manfaat tambahan’ atau (*co-benefit approach*) dari pernyataan PM Mahmoan Singh mengenai mitigasi perubahan iklim sebagai prioritas politik (Dubash, 2013).

Analisis mengungkapkan bahwa India merupakan salah satu pihak yang skeptis tentang perubahan iklim. Beberapa tahun sebelumnya, dunia internasional menyebut India sebagai *deal breaker* karena menolak untuk menandatangani COP17 di Durban terkait kepentingan politik yang menjadi prioritas (Thaker & Leiserowitz, 2014). Inisiatif *zero defect zero effect* dalam kampanye *Make in India* yang digagas Narendra Modi ketika pertama menjabat diidentifikasi oleh South Asia Research sebagai hal yang unik karena transformasi kebijakan India tidak menunjukkan kekhawatiran keluaran emisi karbon dari industri dalam negeri melainkan *branding* ekonomi dari perubahan gaya hidup (Saryal, 2018).

Pada akhir tahun 2016, India mulai meratifikasi Perjanjian Paris yang ditindaklanjuti dengan implementasi dan transformasi sejumlah kebijakan dalam industrinya guna mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca di tahun 2030. Dalam sektor tekstil, India menekankan transformasi kebijakan program masif energi yang dapat diperbarui dalam kerangka *the National*

Solar Mission dan *the National Mission for Enhanced Energy, Zero Defect Zero Effect*, dan skenario *Make in India* dengan target pemenuhan SDG 5: kesetaraan gender, SDG 6: air bersih dan SDG 7: energi terbarukan (Textile Exchange, 2018).

Munculnya norma keberlanjutan yang mempengaruhi masyarakat global untuk lebih bijak dalam berpakaian mendorong para perusahaan merk ternama tidak hanya memikirkan produk apa yang mereka jual dan besarnya keuntungan yang didapat, namun berapa harga yang harus dibayarkan terkait dampaknya pada lingkungan dan nasib buruh yang berada pada lingkaran bisnis tersebut. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki inisiatif-inisiatif dalam mengikuti *trend* konsumen tersebut akan memperoleh keuntungan lebih dari yang lain (Srivastava, 2019).

Namun ramah lingkungan khususnya dalam bisnis tekstil dan industri manapun tidaklah murah. Penggunaan material organik, praktik-praktik *fair trade*, *artful management* membuat produk akan lebih mahal daripada yang diproduksi secara massal dengan teknologi konvensional. Perusahaan umumnya khawatir bahwa harga yang relatif tinggi dari *sustainable product* akan mengurangi jumlah permintaan dari masyarakat kelas bawah (Khandual & Pradhan, 2019). Ketika India pada akhirnya setuju untuk turut menanggung beban polusi global akibat industrinya, hal tersebut memunculkan kontradiksi terkait perubahan kebijakan yang ramah lingkungan dengan usaha penuntasan kemiskinan, percepatan pembangunan dan industrialisasi (Jones & Saran, 2015).

Selain itu, pernyataan resmi India melalui PM Narendra Modi bahwa negaranya sedang dalam tahapan menuju *\$5 trillion economy* tahun 2024 dan *\$10 trillion economy* tahun 2030

memunculkan dilemma dari para ahli terkait tantangan dalam ambisi pertumbuhan industri yang *environmental-friendly*. Graham Institute menegaskan bahwa usaha untuk mempercepat angka pertumbuhan ekonomi memang perlu dilakukan namun dibarengi dengan inovasi serta pengembangan teknologi untuk lingkungan melalui sistem yang lebih bersih dan hijau. Para ahli ekonomi dari World Bank juga menambahkan bahwa apabila India ingin menekankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan, maka India perlu memilah pemakaian sumber daya dan memakai kerangka ekosistem dalam pembuatan kebijakan ekonominya (Saha & Misra, 2019). Hal ini dibuktikan bahwa ketika India telah memiliki sejumlah kebijakan ramah lingkungan yang diadopsi dalam industri tekstilnya, India belum dapat mengimplementasikan keseluruhan komitmennya pada sejumlah target. Berikut adalah bentuk-bentuk transformasi kebijakan tekstil yang di sisi lain memunculkan penekanan bahwa kebijakan ramah lingkungan bukanlah prioritas bagi India.

1. RECP: 5F

Melalui Textiles India 2017, PM Modi mempresentasikan 5F: *Farm to Fibre, Fibre to Fabric, Fabric to Fashion, Fashion to Foreign* dalam program *Resource Efficient and Cleaner Production* (RECP) yang diinisiasi UN *Industrial and Development Organization* (UNIDO) dan UN *Environment Programme* (UNEP) untuk mendampingi pemerintah dan industri dalam memajukan dan merubah sistem ekonomi mereka menuju *2030 Agenda for Sustainable Development* dan pemenuhan target SDGs nomor 9 terkait industri (UNIDO, 2019). 5F merupakan platform untuk menjadikan industri

tekstil sebagai *pioneer* industri ramah lingkungan dengan target tahun 2035 (Berkel, 2017).

Meskipun menekankan pada perbaikan mulai dari pertanian khususnya kapas, perusahaan umumnya masih keberatan untuk meminimalisir penggunaan pestisida guna meningkatkan penjualan yang bersaing dengan *bt-cotton*. Tahun yang sama ketika PM Modi mengumumkan 5F, setidaknya 50 petani kapas di Maharashtra meninggal akibat keracunan pestida (Jain, 2019). Satish W. Wagh, mantan pimpinan perusahaan kimia Chemexil, mengatakan bahwa adanya batasan penggunaan bahan kimia dalam industri guna meminimalisir pencemaran merupakan hal yang dapat menghambat proses pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang seperti India (Khan, 2019). Dari segi pemberdayaan wanita, *farm to fashion* dinilai belum memenuhi kebutuhan bagi pekerja wanita. Perusahaan Sahi Exports tercatat mensubordinasikan buruh wanita yang tidak memiliki waktu untuk istirahat dan upah yang tidak setara. Kasus tersebut baru ditangani setelah adanya desakan dari American Watchdog Group di tahun 2018 (Yar, 2019).

2. *The National Solar Mission*

The National Solar Mission merupakan serangkaian kebijakan *National Action Plan on Climate Change* pada masa PM Mahmoan Singh tahun 2010 (Ministry of New and Renewable Energy, 2010). Pada Desember 2016, pemerintah menyediakan 34 *solar parks* di 21 negara bagian. Dari target mencapai 20GW tahun 2022 instalasi energi matahari, pemerintahan PM Modi menambahkan target hingga 100GW di tahun yang sama (Solar Energy Corporation of India Limited, 2019). Uni Eropa juga memberikan bantuan sebesar

€1.66 miliar untuk pengaplikasian energi matahari selama tahun 2016-2019 melalui *technical assistance for the implementation and management of identified solar parks* (Tschampa, 2019).

Meskipun menekankan akan penggunaan energi matahari pasca Perjanjian Paris, impor batubara justru terus mengalami kenaikan. Selama April-Juni 2019, pemerintah India tercatat mengimpor batubara terbesar dalam lima tahun terakhir sebanyak 74 juta ton yang diperlukan dalam upaya mempercepat infrastruktur (Singh, 2019). Sektor tekstil di India sendiri merupakan salah satu industri yang mengonsumsi energi paling besar dengan teknologi kuno terutama pada sektor yang terdesentralisasi. Produksi tekstil rumahan memakan energi 70-80% dari total produksi tekstil secara keseluruhan (Bhaskar, Verma, & Kumar, 2012).

Data dari *The Rangarajan Committee* tahun 2011-12 menyebutkan 363 juta orang di India hidup di bawah garis kemiskinan yang tidak memiliki akses ke sumber energi. Jones dan Saran dari The Brookings Institute dalam argumen mereka mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk menuntaskan kemiskinan di India adalah melalui percepatan pembangunan dengan sumber energi apapun (Jones & Saran, 2015). Pasca pertemuan COP15 di Kopenhagen tahun 2009, majelis tinggi India (Rajya Sabha) menegaskan bahwa perubahan iklim harus dialamatkan sebagai agenda kebijakan luar negeri dengan tanpa menghalangi upaya pertumbuhan dan pembangunan India. Dengan demikian, perubahan kebijakan ramah lingkungan India dibangun atas dasar pertumbuhan ekonomi, bukan pada kesepakatan iklim global (Dubash, 2013).

Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar kebijakan pemerintah pada hampir

semua sektor industri termasuk tekstil masih mengedepankan industri linear untuk beberapa tahun ke depan meskipun beberapa ahli mendesak pemerintah India untuk memulai mengaplikasikan keseluruhan komitmen industri ramah lingkungan dari tahun 2018. Sebagai contoh, 70% dari rencana infrastruktur untuk tahun 2030 masih memakai sistem konvensional yang akan menambah beban angka polusi udara. India bahkan diprediksi akan dibanjiri permintaan tekstil sebanyak tiga kali lipat menjadi 15 miliar ton pada tahun 2030 apabila tetap memakai konsep industri tekstil konvensional yang cepat dan murah (Mohanraj, 2019). Bukan tanpa alasan, prediksi pada tahun 2050 menunjukkan akan terjadi peningkatan PDB di seluruh dunia hingga 400% yang akan memicu jumlah permintaan akan pakaian (Drew & Reichart, 2019).

3. Pengolahan Limbah melalui ZLD

Dalam rangka memberi perhatian lebih pada industri tekstil sebagai penyebab masifnya penggunaan air bersih dan pembuangan limbah secara sembarangan, kementerian lingkungan, perhutanan dan perubahan iklim (KLKPI) mengumumkan kebijakan *Zero Liquid Discharge* (ZLD) tahun 2016. Konsep ZLD ini merupakan salah satu komitmen dari Perjanjian Paris yang masuk dalam kerangka *Zero Defect Zero Effect*. Kebijakan ZLD mengharuskan setiap industri untuk mengolah limbah tekstil sebanyak 25 kilo liter per hari dan penggunaan garam bersodium sulfat yang memungkinkan air dapat digunakan kembali untuk konsumsi domestik (Ministry of Environment, Forests & Climate Change, 2015).

Namun, pengolahan limbah melalui sistem ZLD memiliki beberapa tantangan dalam implementasi seperti perlunya investasi yang besar karena biaya perawatan yang tinggi. Selain itu,

ZLD disebut tidak dapat menyelesaikan masalah lingkungan, melainkan hanya kesehatan karena pemakaian ZLD memerlukan daya dan energi yang besar (Zsakay, 2018). ZLD justru memakan konsumsi energi sebanyak 50% dalam industri. Kebijakan ini juga dapat menaikkan harga produk jadi yang memberatkan konsumen akibat dipengaruhi oleh naiknya biaya produksi hingga 25-30%. Di Tirupur, pengoperasian ZLD memakan biaya Rs 200-250 per kilo liter dibanding industri yang tidak mengoperasikan ZLD di angka Rs 15-30 per kilo liter (Centre for Environment Education & Industrial Pollution Prevention Group, 2016).

4. Reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan

Hingga pertengahan tahun 2016, pemerintah setidaknya telah mengkonversikan 44 pasal ke dalam empat kode yang berkaitan antara hubungan antar industri, upah, keamanan sosial dan keselamatan (Wazir Advisors, 2016). Namun baru pada Juli 2019, undang-undang tersebut disahkan Parlemen India dengan nama *the Code on Wages: the code on occupational safety, health, and working condition bill*. Hal ini terkait pemberian upah minimum yang berbeda-beda di tiap negara bagian, kondisi ruang kerja yang tidak layak seperti minimnya ruang terbuka, tidak adanya cek kesehatan rutin bagi pekerja dan sebagainya. Di dalam *code on wages*, industri harus memberikan biaya cek kesehatan rutin secara gratis, jaminan kesetaraan gender dan anti diskriminasi dan sebagainya (Ministry of Labour & Employment, 2019).

Meskipun *code of wages* ditekankan untuk menjamin upah minimum pada tiap-tiap sektor di seluruh negeri, di dalamnya masih tidak jelas mengenai bagaimana penerapan upah minimum

tersebut diimplementasikan. Dengan kata lain, ketika banyak pekerja yang menuntut standar upah minimum, para atasan masih dapat dengan mudah untuk menolak atau menyuruh mereka mencari pekerjaan lain. Salah satu kelebihan yang dimiliki India adalah tenaga kerja yang relatif murah terutama dalam sektor tekstil. Bangladesh dan Pakistan masih memiliki upah buruh yang lebih rendah dibanding India yang artinya tekstil India akan kembali tersaingi dalam sektor produktivitas dan sumber daya manusia. Professor ekonomi dari Xavier School di Jamshepdur, Shyam Sundar mengatakan bahwa hambatan terbesar bagi ekonomi India adalah bukan karena lemahnya regulasi ketenagakerjaan, namun karena regulasi ketenagakerjaan tidak benar-benar menjadi kekhawatiran (Sanghera, 2019).

5. Pembaruan Teknologi

Dalam sektor tekstil, pemerintah masing-masing negara bagian akan memberi subsidi sebesar 60% dalam *Technology Upgradation Application Fund Scheme (TUFS)* apabila industri mengaplikasikan energi matahari dalam rangka mencapai SDG pemerintah. Selain sebagai pembaruan teknologi, skema ini dibuat untuk meningkatkan daya saing terutama pada sektor yang terdesentralisasi serta dapat memberikan lingkungan kerja yang lebih baik (Ministry of Textiles, 2017).

Di sisi lain, pengamat dari Indian Institute of Technology, Prakash Khude mengatakan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan upaya modernisasi, pemakaian mesin berteknologi kuno masih intens di mana hingga tahun 2017 konsumsi energi yang tidak dapat diperbarui untuk sektor tekstil masih mewakili angka 15-20% dari total keseluruhan industri (Khude, 2017). Sektor tekstil sendiri merupakan salah satu industri yang mengonsumsi

energi paling dengan teknologi kuno terutama pada sektor yang terdesentralisasi. Produksi tekstil rumahan memakan energi 70-80% dari total produksi tekstil secara keseluruhan (Bhaskar, Verma, & Kumar, 2012).

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa transformasi kebijakan tekstil di India belum diimplementasikan secara intens. Salah satu kendala sulitnya penerapan industri yang mengadopsi nilai-nilai keberlanjutan menurut penelitian *Mudra Institute of Communication, Ahmadedabad/MICA* adalah kurangnya kepedulian akan lingkungan yang berkaitan dengan industri tekstil di negara tersebut (Parikh, 2018). Hal ini dikarenakan transisi menuju industri yang lebih ramah lingkungan merupakan suatu hal yang *high cost* dan tidak efisien yang bertentangan dengan rencana percepatan industri India. Selama ini, permintaan tekstil yang masif dipenuhi dengan proses konvensional yang menuntun industri meningkatkan penggunaan serat sintetis dan bahan kimia dalam pewarnaan (Bhutoria, 2018). Namun, dengan konsep *take, make, recycle*, perusahaan tidak lagi memproduksi barang dalam jumlah masif (Mohanraj, 2019). Ekspor tekstil India bahkan diperkirakan akan naik hingga \$82 miliar di tahun 2021. Meskipun 'permintaan tekstil' di sini dapat mengarah pada permintaan pasar yang menekankan praktik-praktik etis ataupun yang bukan, perusahaan harus memainkan cara bagaimana mengakomodasi jenis-jenis permintaan tersebut dengan biaya produksi yang murah (Segran, 2019).

Dengan kata lain, kebijakan tekstil yang ramah lingkungan di India masih memprioritaskan profit di atas perlindungan lingkungan maupun praktik etis. Seorang advokat bisnis, Subhash Bhutoria, mengatakan bahwa

hukum yang mengikat terkait lingkungan tidak akan mencegah bisnis tekstil dan pakaian di India dengan metode konvensional untuk terus beroperasi. Amandemen undang-undang lingkungan terkait unit-unit tekstil yang diperbarui oleh kementerian lingkungan pasca ratifikasi Perjanjian Paris menurut Bhutoria tidak mencakup norma-norma batasan terhadap keluaran emisi dari industri tekstil meskipun terdapat wacana bahwa pemerintah akan terus melakukan amandemen hukum lingkungan terkait tekstil untuk mengatur emisi gas rumah kaca dan polusi air (Bhutoria, 2018) seperti salah satunya pada amandemen UU lingkungan tahun 2019 terkait *the hazardous waste* sejak tahun 2016 (Ministry of Environment, Forest and Climate Change, 2019). Peneliti dari Brookings Institute, Charles Frank bahkan berasumsi bahwa *Intended Nationally Development Contribution* (INDC) yang diajukan India ke UNFCCC dengan target di tahun 2030 akan gencar dilakukan dengan skenario *business as usual* dengan penggunaan batubara (Ebinger, 2016).

Oleh karena itu, transformasi kebijakan yang ramah lingkungan India belum meninggalkan industri tekstil dengan sistem linear (konvensional) yang telah lama menjadi akar rantai produksi. Transformasi kebijakan diadopsi karena adanya penambahan jenis pasar baru yang menginginkan konsep keberlanjutan (transparansi dan ramah lingkungan) dalam sistem produksi. Pengadopsian kebijakan ramah lingkungan terutama ke dalam industri tekstil merupakan hal yang bertentangan antara konsep keberlanjutan dengan upaya percepatan industri di India meskipun memang dengan beralihnya sektor tekstil ke produksi yang lebih menginklusi lingkungan dan memperhatikan etika

tenaga kerja akan lebih meningkatkan produktivitas penjualan ke negara-negara yang menjadikan ramah lingkungan dan praktik etis sebagai prioritas (Aspengren & Nordenstam, 2019). Di sisi lain, laporan *energy initiative* dari Brookings Institute tahun 2019 menyebutkan bahwa India masih memerlukan batubara dalam percepatan industri dan energi terbarukan digunakan untuk melengkapi proses karena industri yang terlalu kotor dapat mengalami kebangkrutan. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa transisi India ke industri ramah lingkungan memang terkait masalah lingkungan dalam negeri terutama polusi, namun tidak lantas menjurus pada isu perubahan iklim (Tongia & Gross, 2019).

Melihat dari adanya kontradiksi antara komitmen perubahan dengan implementasi mengindikasikan bahwa India masih mengedepankan harga murah, efisiensi dan percepatan dalam sistem industri dalam negeri. Kebijakan-kebijakan ramah lingkungan yang diadopsi India masih hanya pada batas komitmen yang menunjukkan bahwa India mulai mengikuti standar-standar internasional terkait lingkungan dan sosial. Pasca India meratifikasi Perjanjian Paris, Uni Eropa mengadopsi *EU's Strategy for India* tahun 2018 yang ditujukan untuk memaksimalkan usaha India beralih pada industri terbarukan seperti energi, modernisasi, perubahan iklim, kerja sama strategis dan sebagainya. Peneliti dari Swedish Institute for International Affairs, Aspengren dan Nordenstam dalam laporan *The Partnership Shift: Analysing the EU's Strategic Engagement with India* mengatakan bahwa peningkatan kerja sama disebabkan karena Uni Eropa masih memandang India sebagai *partner* ekonomi dan strategis yang penting. Setelah memiliki visi yang sama untuk energi terbarukan, India dan Uni Eropa

dapat mengejar kepentingan ekonomi bersamaan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 (Aspengren & Nordenstam, 2019).

Di samping itu, tidak tepat untuk menyebut bahwa industri ramah lingkungan dalam tekstil sebagai sesuatu yang pantas diperdebatkan dalam hitung-hitungan untung-rugi karena dengan mengadopsi industri yang lebih ramah lingkungan, negara manapun akan memperoleh berbagai kelebihan seperti tingkat polusi yang rendah, efisiensi air bersih, kesehatan masyarakat hingga peningkatan kesejahteraan apabila ekonomi nasional dapat mengkonversikan energi ramah lingkungan ke dalam hitungan matematis. Dosen ilmu lingkungan di Univerity of Washington, Badri Gopalakrishnan, juga mengkalkulasikan bahwa apabila industri tekstil India menggunakan teknik pewarnaan natural, maka perusahaan dapat menghemat biaya konsumsi bahan kimia serta meminimalisir emisi gas padat untuk tekstil kapas hingga 30% dan tekstil wol 20% (Gopalakrishnan B. N., 2018). Dari segi bentuk kerja sama dagang, ketika India mulai menunjukkan praktik keberlanjutan yang memiliki *common values* dengan Uni Eropa, kerja sama diantaranya menguat di tahun 2018 yang oleh Dr. Garima Mohan disebut sebagai *common action* dalam peningkatan kerja sama ekonomi, strategis serta promosi SDGs (Mohan G. , 2019).

Secara garis besar, industri ramah lingkungan dapat menguntungkan meskipun membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan ekonomi konvensional. Adanya transformasi dalam keseluruhan kebijakan industri termasuk tekstil memang mendorong perkembangan awal kerja sama India dan Uni Eropa ke depan dalam konsep *common values common action* di tahun 2018. Namun India memerlukan proses

untuk benar-benar beralih pada industri yang ramah lingkungan di mana negara tersebut masih mengandalkan energi fosil untuk industri. Perubahan dalam kebijakan khususnya tekstil ini merupakan agenda untuk mendorong pertumbuhan ekspor khususnya ke Uni Eropa meskipun pemerintah masih mengakomodasi permintaan pasar yang tidak mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan. Melalui kebijakan saat ini, India diproyeksikan akan menambah penyerapan tenaga kerja hingga 36 juta dan level produksi mencapai \$350 miliar tahun 2024-25 pada industri tekstil menurut kementerian tekstil dalam *Vision, Strategy and Action Plan for Indian Textile and Apparel Sector* (Make in India, 2017).

IV. Kesimpulan

Kebijakan tekstil yang ramah lingkungan di India merupakan bentuk respon dari adanya standar Uni Eropa dalam membangun kerja sama yang didasarkan pada klausul lingkungan dan sosial. Penetapan standar lingkungan dan sosial dari Uni Eropa tersebut berasal dari adanya perubahan perilaku masyarakat yang mulai menginklusi kekhawatiran terhadap isu-isu iklim dan etisme dalam gaya hidup. Meskipun pemerintah India mulai mengusahakan adanya transformasi dalam industrinya, keberlanjutan industri konvensional pada hampir semua sektor termasuk tekstil mengindikasikan bahwa India tidak lantas meninggalkan industri tekstil konvensional. Transformasi industri tekstil ke arah yang lebih ramah lingkungan merupakan strategi untuk mengakomodasi permintaan pasar baru di Uni Eropa tanpa memprioritaskan isu perubahan iklim global.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Balaam, D. N., & Dillman, B. 2014. *Introduction to International Political Economy*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Clapp, J., & Dauvergne, P. 2005. *Paths to a Green World: The Political Economy of the Global Environment*. Massachusetts: The MIT Press.
- Gopalakrishnan, B. N. 2018. *Economic and Environmental Policy Issues in Indian Textile and Apparel Industries*. Seattle: Springer.
- Hudson, V. M. 2014. *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory (second edition)*. Maryland: Rowman & Littlefield
- Kütting, G. 2004. *Globalization and the Environment: Greening Global Political Economy*. New York: State University of New York Press.
- The International Forum on Globalization. 2003. *Globalisasi, Kemiskinan & Ketimpangan*. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.

Bab Dalam Buku

- Begum, Z., & Kumar, K. K. 2018. "Global Environmental Requirements—Textile Industry". Dalam *A Study of India's Textile Exports and Environmental Regulations*, diedit oleh K. K. Kumar. Chennai: Springer.
- Kumar, K. K., Begum, Z., & Das, S. 2018. "Non-tariff Barriers in Textiles: Incidence and Perceptions". Dalam *A Study of India's Textile Exports and Environmental Regulations*, diedit oleh K. K. Kumar. Chennai: Springer.
- Narayanan, G. B. 2018. "Exploring Linkages Between Pollution in Textile Industry". Dalam *A Study of India's Textile Exports and Environmental Regulations*, diedit oleh K. K. Kumar. Chennai: Springer.
- Snyder, R. C., Bruck, H., & Sapin, B. 1969. Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics. In J. N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy* (pp. 199-206). New York: Free Press.

Jurnal

- Adam, B., & Kütting, G. 1995. Time to reconceptualize 'green technology' in the context of globalization and international relations. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, No. 3 (8):243-259.
- Afinotan, A. L. 2014. Decision Making in International Relations: A theoretical Analysis. *Canadian Social Science*, No. 5 (10): 249-256.
- Agarwala, R. 2016. Redefining Exploitation: Self-Employed Workers' Movements in India's Garments and Trash Collection Industries. *International Labor and Working-Class History*, No. 89:107-113.
- Bhaskar, M. S., Verma, P., & Kumar, A. 2012. Indian Textile Industries Towards Energy Efficiency Movement. *International Journal of Environmental Science: Development and Monitoring (IJESDM)*, No. 3 (4):36-39.
- Chaudhuri, K. 1978. *The Trading World of Asia and the English East India Company 1660-1760*. New York: Cambridge University Press
- Dubash, N. K. 2013. The politics of climate change in India: narratives of equity and cobenefits. *WIREs Climate Change*. Vol. 4:191–201.

- Hiremath, R. B., Kattumuri, R., Kumar, B., Khatri, V. N., & Patil, S. S. 2012. An integrated networking approach for a sustainable textile sector in Solapur, India. *Journal of Technological Economy*. No. 2 (33):140-151.
- Jaybhaye, P. 2018. Impact of Drought Weather on Bt Cotton Growth, Development and Yield. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, No. 6:2332-2338.
- Khandual, A., & Pradhan, S. 2019. Fashion Brands and Consumers Approach Towards Sustainable Fashion. *Journal of Fashion Marketing and Management*, 37-53.
- Khorana, S., & Soo, K. T. 2016. Barriers to Exporting to the EU: Evidence from Textiles and Leather. *A Project Funded by the British High Commission*, 2-21.
- Khude, P. 2017. A Review on Energy Management in Textile Industry. *Journal of Textile Technology*. No. 2 (6):169.
- Oberoi, B. 2013. Determinants of Demand for the Indian Textile Industry. *Journal of Economic and Political*, No. 3 (48):62-70.
- Putnam, R. D. 1988. Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. *International Organization*, No. 3 (42):427-460.
- Saryal, R. 2018. Climate Change Policy Of India: Modifying The Environment. *South Asia Research*. No. 38(1):1-19.
- Supriya, J., & Vidya, Y. 2012. The Dark Side Of Globalization - In Context Of India. *International Journal of Engineering and Management Sciences*, No. 1 (3):29-31.
- Thaker, J., & Leiserowitz, A. 2014. Shifting discourses of climate change in India. *Journal of Climate Change*. No.123:107–119.

Laporan yang Ditulis oleh Instansi

- Aspengren, H. C., & Nordenstam, A. 2019. *The Partnership Shift: Analysing the European Union's Strategic Engagement with India*. Stockholm: The Swedish Institute Of International Affairs.
- CBI Minister of Foreign Affairs. 2019. *Exporting sustainable apparel to Europe*. Minister of Foreign Affairs of European Union.
- Ebinger, C. K. 2016. *India's Energy and Climate Policy Can India Meet the Challenge of Industrialization and Climate Change?* Washington D.C.: The Brookings: Energy Eecurity and Climate Initiative.
- Felbermayr, P. G., Mitra, P. D., Aichele, D. R., & Gröschl, D. J. 2016). *Europe and India: Relaunching Troubled Trade Relationship*. Gütersloh: The Bertelsmann Foundation.
- Hayashi, M. 2007. *Trade In Textiles And Clothing: Assuring Development Gains In A Rapidly Changing*. Geneva: UNCTAD.
- India Law Offices. 2008. Indian Textile Industry. *ILO Report*, 1-18.
- International Trade Centre & European Commission. 2019. *The European Union Market for Sustainable Products: The retail perspective on sourcing policies and consumer demand*. Geneva: International Trade Centre & European Commission.
- Ministry of Environment, Forests & Climate Change. 2015. *Guidelines on Techno-Economic Feasibility of Implementation of Zero Liquid Discharge (ZLD) for Water Polluting Industries*. Delhi: Central Pollution Control Board.
- Ministry of Textiles. 2017. *Comprehensive Scheme For Powerloom Sector Development*. Delhi: Ministry of Textiles.
- Mohan, G. 2019. Prospect for The New EU Strategy Game Changer or Business as Usual. *Center for Asian Studies*, 6-22.

- Morlet, A., Opsomer, R., Herrmann, D. S., Balmond, L., Gillet, C., & Fuchs, L. 2017. *A New Textiles Economy: Redesigning Fashion's Future*. Cowes: Ellen MacArthur foundation.
- Šajn, N. 2019. *Environmental impact of the textile and clothing industry*. Brussels : European Parliamentary Research Service (EPRS).
- Textile Exchange. 2018. Threading the Needle. *Sustainable Development*, 58-61.
- The European Commission. 2009. *Trade Sustainability Impact Assessment for the FTA between the EU and the Republic of India*. Rotterdam: The European Commission Internal Data Protection Regulation.
- Tongia, R., & Gross, S. 2019. *Coal in India: Adjusting to transition*. Washington D.C.: The Brookings Institute.

Platform Online Resmi

- Ethical Consumer. 2019. "Boycotts List". *Ethical Consumer* : Tersedia online melalui <<https://www.ethicalconsumer.org/ethicalcampaigns/boycotts/>>, diakses 04 Oktober 2019.
- Jain, A. 2019. "India's Cotton Farmers Fight for Their Lives and Land." *The New Fashion Initiative*, 30 Juli. Tersedia online melalui <<https://thenewfashioninitiative.org/indias-cotton-farmers-fight-for-their-lives-and-land/>>, diakses 21 November 2019
- Jones, B., & Saran, S. 2015. "An 'India Exception' and India-U.S. Partnership on Climate Change". *Brookings*, 15 Januari. Tersedia online melalui <<https://www.brookings.edu/blog/planetpolicy/2015/01/12/an-india-exception-and-india-u-s-partnership-on-climate-change/>>, diakses 10 Desember 2019
- Make in India. 2019. "Textiles And Garments". *Make in India*. Tersedia online melalui <<http://www.makeinindia.com/sector/textiles-and-garments/>>, diakses 19 September 2019
- Make in India. 2017. "Policy Ecosystem For India's Textile Sector". *Make in India*. Tersedia online melalui <<http://www.makeinindia.com/article/-/v/nurturing-textiles-policy-ecosystem-for-the-textile-sector/>>, diakses 19 Oktober 2019
- Mann, R. 2019. "Textiles & Garments". *Invest India*, 5 September. Tersedia online melalui <<https://www.investindia.gov.in/sector/textiles-garments/>>, diakses 24 Oktober 2019
- Ministry of Environment, Forests and Climate Change. 2019. "Amendment in Hazardous Waste (Management & Transboundary Movement) Rules". *Ministry of Environment, Forest and Climate Change*: <<https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=189227>>, diakses 18 Desember 2019
- Ministry of Labour & Employment. 2019. "The Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions Bill, 2019 Introduced in Lok Sabha Today". *Press Information Bureau*, 23 Juli. Tersedia online melalui <Ministry of Labour & Employment: <https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=192112>>, diakses 22 November 2019
- Ministry of New and Renewable Energy. 2010. "Resolution". *Ministry of New and Renewable Energy*, 11 Januari. Tersedia online melalui <<https://mnre.gov.in/resolution/>>, diakses 9 Desember 2019
- Shiva, D. V. 2013. "The Seeds Of Suicide: How Monsanto Destroys Farming". Retrieved from *Global Research*, 5 April. Tersedia online melalui

- <<https://www.globalresearch.ca/the-seeds-of-suicide-how-monsanto-destroys-farming/5329947>>, diakses 10 November 2019
- Shiva, V., & Jafri, A. H. 2004. "Failure of GMOs in India". *Greens.org*. Tersedia online melalui <<http://www.greens.org/s-r/33/33-04.html>>, diakses 17 November 2019
- Tschampa, F. 2019. "EU India step up cooperation on solar energy". *Delegation of the European Union to India and Bhutan*, 28 Juni. Tersedia online melalui <https://eeas.europa.eu/delegations/india_en/64757/EU%20India%20step%20up%20cooperation%20on%20solar%20energy>, diakses 10 Desember 2019
- UNIDO. 2019. "The Global Network for Resource Efficient and Cleaner Production (RECPnet)". *United Nations Industrial Development Organization*. Tersedia online melalui <<https://www.unido.org/our-focus/safeguarding-environment/resource-efficient-and-low-carbon-industrial-production/resource-efficient-and-cleaner-production/global-network-resource-efficient-and-cleaner-production-recpnet>> diakses 15 September 2019.
- United Nations Climate Change. 2008. "Sustainable Textiles for Sustainable Development – India". *United Nations Climate Change*. Tersedia online melalui <<https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/activity-database/sustainable-textiles-for-sustainable-development>>, diakses 15 September 2019
- Wazir Advisors. 2016. *Foreign Direct Investment Scenario In Indian Textile Sector*. Gurgaon: Wazir Advisors. Tersedia online melalui <<http://texmin.nic.in/sites/default/files/FDI%20Scenario%20in%20Indian%20Textiles%20Sector%20-%20A%20Study%20Report.pdf>>
- Zsakay, A. 2018. "Changing Times – Fast Fashion Comes To India" . Retrieved from *Circular Economy Asia*, 1 April. Tersedia online melalui <<http://www.circulareconomyasia.org/changing-times-fast-fashion-comes-to-india/>>, diakses 27 November 2019

Audio, Video, Film

Morgan, A. (Director). 2015. *The True Cost* [Motion Picture].

Media Massa

- Bauer, S., & Jagasia, D. 2019. "Is the Indian textile and apparel industry reinventing itself?" *Forbes India* 28 Juni 2019. Tersedia online melalui <<http://www.forbesindia.com/blog/the-innovation-edge/is-the-indian-textile-and-apparel-industry-reinventing-itself/>>, diakses pada 31 Oktober 2019
- Sustainable Brands. 2018. *Sustainable Brands*, 22 Februari. Tersedia online melalui <<https://sustainablebrands.com/read/supply-chain/garment-worker-diaries-reveal-working-conditions-wages-in-bangladesh-india-cambodia>>, diakses 14 Januari 2020
- The Legatum Prosperity Index. 2018. "India". *The Legatum Prosperity Index*. Tersedia online melalui <<https://www.prosperity.com/globe/india>> diakses 27 Oktober 2019
- Berkel, R. V. 2017. "Creating sustainable value chains in India's textile industry". *United Nations Industrial Development Organization*, 2 Juli. Tersedia online melalui <<https://www.unido.org/news/creating-sustainable-value-chains-indias-textile-industry>>, diakses 14 November 2019

- Bhutoria, S. 2018. "Climate change impacts the Indian fashion industry". *Luxury Law Alliance*, 7 September. Tersedia online melalui <<http://www.luxurylawalliance.com/news-features/climate-change-impacts-the-indian-fashion-industry/996130925>>, diakses 18 Desember 2019
- Child, D. 2019. "India has the world's worst air pollution: report". *Al Jazeera*, 5 Mei. Tersedia online melalui <<https://www.aljazeera.com/news/2019/03/india-world-worst-air-pollution-report-190305151923982.html>>, diakses pada 3 Oktober 2019
- Climate Action Tracker. 2019. September 19). "India". *Climate Action Tracker*, 19 September: Tersedia online melalui <<https://climateactiontracker.org/countries/india/>>, diakses 25 September 2019
- Cone, M. 2006. "European Parliament OKs world's toughest law on toxic chemicals / 30,000 substances to be regulated -- U.S. will be affected". *SFGate*, 14 Desember. Tersedia online melalui <<https://www.sfgate.com/green/article/European-Parliament-OKs-world-s-toughest-law-on-2465418.php>>, diakses 15 November 2019
- Drew, D., & Reichart, E. 2019. "By the numbers: the economic, social and environmental impacts of 'fast fashion'". *GreenBiz*, 17 Januari: Tersedia online melalui <<https://www.greenbiz.com/article/numbers-economic-social-and-environmental-impacts-fast-fashion>>, diakses 04 Oktober 2019.
- Khadka, N. S. 2019. "Climate change: Will India's election energy lead to CO2 rise?". *BBC*, 17 Mei: Tersedia online melalui <<https://www.bbc.com/news/science-environment-48283612>>, diakses 30 September 2019.
- Khan, S. 2019. A \$163 billion sector is fighting against a hazardous future. *Economic Times*, 23 Oktober. Tersedia online melalui <<https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/sme-sector/a-163-billion-sector-is-fighting-against-a-hazardous-future-chemical-sector-india/articleshow/71716343.cms>>, diakses 9 Januari 2020
- Mohanraj, P. 2019. "Circular Economy: An alternative development pathway for India". *India Inc*, 15 Februari: Tersedia online melalui <<https://indiaincgroup.com/circular-economy-an-alternative-development>>
- Nagaraj, A. 2019. "India's 'invisible' home garment workers exploited by fashion brands". *Reuters*, 01 Februari: Tersedia online melalui <<https://www.reuters.com/article/us-india-garments-women/indias-invisible-home-garment-workers-exploited-by-fashion-brands-idUSKCN1PQ483>>, diakses 04 Mei 2019
- Parashar, P. 2019. "Why India's apparel exports are falling". *Live Mint*, 23 April. Tersedia online melalui <<https://www.livemint.com/market/mark-to-market/why-india-s-apparel-exports-are-falling-1555958315769.html>>, diakses 20 Oktober 2019
- Parikh, N. 2018. "Circular economy need of the hour to minimize textile waste". *Times of India*, 2 April. Tersedia online melalui: <<https://timesofindia.indiatimes.com/business/circular-economy-need-of-the-hour-to-minimize-textile-waste-study/articleshow/63583328.cms>>, diakses 22 November 2019
- Ratcliffe, R. 2019. "Major western brands pay Indian garment workers 11p an hour". *The Guardian*, 1 Februari. Tersedia online melalui <<https://www.theguardian.com/global-development/2019/feb/01/major-western-brands-pay-indian-garment-workers-11p-an-hour>>, diakses 11 November 2019

- Saha, D. G., & Misra, D. S. 2019. "5 trillion dollar economy of India: A green perspective". *Business Today*, 8 September. Tersedia online melalui <<https://www.businesstoday.in/opinion/columns/indian-economy-five-trillion-dollar-narendra-modi-green-perspective-gdp/story/377981.html>>, diakses 19 Oktober 2019
- Sanghera, T. 2019. "India at work: Labour reforms aim to boost wages and productivity". *Al Jazeera*, 1 November. Tersedia online melalui <<https://www.aljazeera.com/ajimpact/india-work-labour-reforms-aim-boost-wages-productivity-191101122855317.html>>, diakses 22 November 2019
- Segran, E. 2019. "These 1.3 billion people could test brands' addiction to fast fashion". *Fast Company*, 31 Januari. Tersedia online melalui: <<https://www.fastcompany.com/90293591/these-1-3-billion-people-could-test-brands-addiction-to-fast-fashion>>, diakses 27 November 2019
- Singh, K. 2019. "India's coal imports will grow at the fastest rate in five years." *The Atlas*, 18 September: Tersedia online melalui <<https://www.theatlas.com/charts/N-MZShXMR>>, diakses 27 September 2019.
- Solar Energy Corporation of India Limited. 2019. Statewise Solar Parks. *Solar Energy Corporation of India Limited*. Tersedia online melalui <https://seci.co.in/other_page.php?mmid=4&page=statewise_solar_parks>, diakses 9 Desember 2019
- Sonowal, B. 2018. "Circular Economy: What It Is and Why Does India Need It?". *Young Bharatiya*, 14 November: Tersedia online melalui <<https://www.youngbhartiya.com/article/circular-economy-what-it-is-and-why-does-india-need-it>>, diakses 04 Oktober 2019
- Srivastava, M. 2019. Circular Economy Makes Headway In Indian Fashion. *Mintel*, 16 April. Tersedia online melalui <<https://www.mintel.com/blog/new-market-trends/circular-economy-makes-headway-in-indian-fashion>>, diakses 19 Oktober 2019
- Suneja, K. 2019. "Indian cotton fabric, yarn exports fall due to high duties: Study". *The India Times*, 11 Februari. Tersedia online melalui <<https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/indian-cotton-fabric-yarn-exports-fall-due-to-high-duties-study/articleshow/67933119.cms>>, diakses 20 Oktober 2019
- The Hindu Business Line. 2019. "India-EU free trade pact not possible without lowering tariffs for cars". *The Hindu Business Line*, 1 Maret. Tersedia online melalui <<https://www.thehindubusinessline.com/economy/india-eu-free-trade-pact-not-possible-without-lowering-tariffs-for-cars/article26409471.ece>>, diakses 19 November 2019
- Yar, S. 2019. "Who Made Your Clothes?" *The New York Times*, 19 Desember. Tersedia online melalui <<https://www.nytimes.com/2019/12/19/style/garment-workers-around-the-world.html>>, diakses 11 Januari 2020